

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi makro yang menjadi isu utama dibahas pada tingkat pemerintahan semua negara maupun daerah salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kondisi kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduknya. Ketika semakin banyak jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, hal ini menandakan bahwa kesejahteraan di wilayah tersebut berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.² Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang miskin, tetapi juga memperlambat laju pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan kesejahteraan serta kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan wilayah yang luas namun tidak semua masyarakat Indonesia mengalami kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi

² Livenchy K. Manangkalangi, dkk, “Analisis Pengaruh PDRB Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018),” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 3 (2021): 66-78, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/30643/29477>, hlm.67

³ Mutiara Olencia Indra, Popon Srisusilawati, dan Redi Hadiyanto, “Analisis Penyaluran Dana ZIS Di BAZNAS Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan” 4, no. 1 (2024): 24-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3651>, hlm. 24

tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan.⁴ Menurut Oscar Lewis kemiskinan terjadi karena adanya kebudayaan miskin yang dijadikan gaya hidup masyarakat dan sulit untuk dihilangkan.⁵ Salah satu kriteria dari kemiskinan yang umum digunakan dan diterima secara luas adalah rendahnya pendapatan karena pendapatan mencerminkan standar riil masyarakat. Standar hidup riil masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila dilihat dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan angka partisipasi angkatan kerja sangat penting karena apabila lebih banyak penduduk yang tidak bekerja, akan berakibat pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang sulit untuk menangani permasalahan kemiskinan karena sifatnya yang multidimensi.⁶

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya guna menanggulangi masalah kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia-pun telah menyadari hal tersebut. Selaras dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan daerah terus diupayakan di daerah khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan

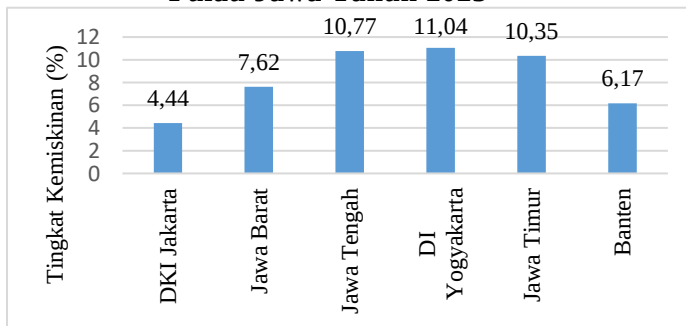
⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 8

⁵ Nisrina Mahdiyah, “Studi Literatur Kebudayaan Kemiskinan Pada Pengemis Di Perkotaan,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 46-54, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4020>, hlm. 46

⁶ Dela Rahmah Fauziah, Whinarko Juliprijanto, dan Jalu Aji Prakoso, “Pengaruh Investasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Tpk Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019,” *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 3, no. 1 (2021): 53–68, <https://doi.org/10.31002/dinamic.v3i1.2694>, hlm. 55

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah, mengikuti arah dan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu laju penurunan kemiskinan adalah salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional. Efisiensi dalam mengurangi tingkat kemiskinan menjadi fokus utama dalam menentukan strategi dan alat-alat pembangunan. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, masalah kemiskinan masih menghambat perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.⁷ Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2023



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah DI Yogyakarta, dengan luas

⁷ Masrida Zasriati dan Ari Sanjaya. *Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Upah Minimum Regional Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2008-2016*". *Jurnal Agregate Ekonomi Pembangunan*. 2, no. 2, (2020): 101-110, <https://e-journal.stiesak.ac.id/index.php/60201/article/view/229>, hlm. 102

wilayah 34.337,48 km², jumlah penduduk 37.540.962 jiwa, dan kepadatan penduduknya 1.093 per km². Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah di tahun 2023 mencapai 3.791,50 ribu jiwa, lebih banyak dibandingkan DI Yogyakarta yaitu 448,47 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 berada pada angka 10,77%, dimana tingkat kemiskinan ini masih tergolong tinggi, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan nasional di Indonesia pada tahun tersebut yang berada di angka 9,36%.⁸ Jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Setiap tahunnya masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi masalah sosial yang serius sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang insentif dari pemerintah.

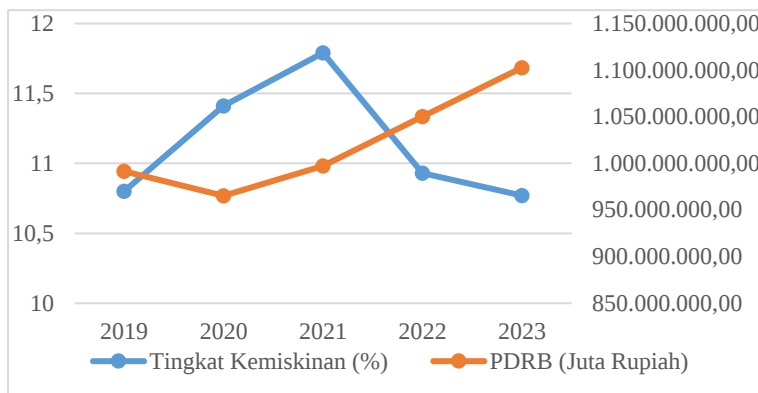
Menurut Nurkse pada teori lingkaran setan kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan antara lain kurangnya pengembangan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya akses modal menyebabkan rendahnya produktivitas.⁹ Berdasarkan teori tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto adalah elemen penting dalam pembangunan ekonomi, berperan dalam mengurangi kemiskinan dan menjadi indikator utama kesehatan ekonomi suatu daerah. Tingginya Produk Domestik Regional Bruto mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang mendorong peluang kerja dan peningkatan pendapatan rumah

⁸ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah (Persen) 2023", dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html> diakses 3 September 2024

⁹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 33

tangga. Pertumbuhan ekonomi tanpa penambahan kesempatan kerja dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan, yang berujung pada peningkatan kemiskinan.¹⁰ Berikut ini Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Gambar 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2023 Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Namun tingginya Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 belum diimbangi pemerataan, pembangunan ekonomi daerah masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Terdapat 23 kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah. Wilayah yang

¹⁰ Handika Permana dan Esti Pasaribu, “Pengaruh Inflasi, IPM, UMP Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 3 (2023): 1113–1132, <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3516>, hlm. 1122

mempunyai Produk Domestik Regional Bruto terendah adalah Kota Magelang yaitu sebesar 7.264.923,66 juta rupiah yang dapat diartikan bahwa kontribusi nilai barang dan jasa yang dihasilkan paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lain, hal ini dikarenakan sektor/lapangan usaha daerah tersebut relatif tertinggal. Sedangkan PDRB tertinggi berada di Kabupaten Semarang yaitu sebesar 161.849.112,44 juta rupiah. Kabupaten Semarang sebagai pusat perekonomian di beberapa lapangan usaha, laju pertumbuhan terbesarnya berasal dari sektor akomodasi dan makan minum, transportasi, dan pengadaan listrik, sehingga daerah tersebut berhasil mendorong nilai tambah barang dan jasa menjadi lebih tinggi.¹¹ Dengan demikian, tinggi dan rendahnya Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan di setiap Kabupaten/Kota Jawa Tengah menggambarkan bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi yang ada. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya dengan efektif sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

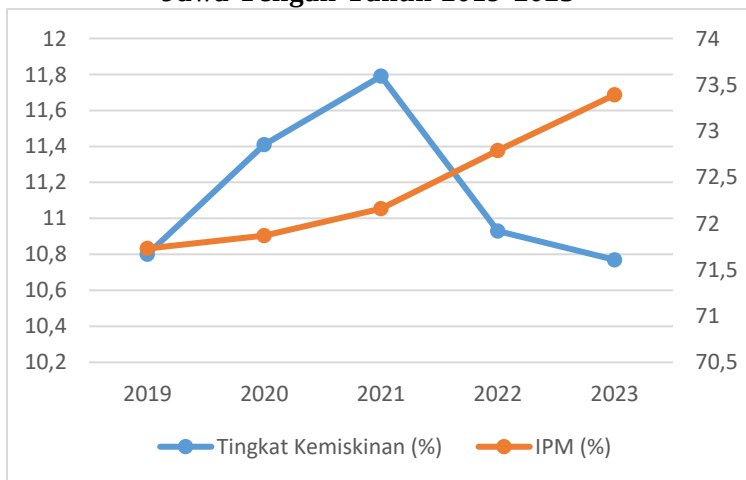
Kemiskinan juga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah menjadi faktor utama kemiskinan karena kesehatan yang baik dan pendidikan yang memadai dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia tercermin pada nilai Indeks Pembangunan Manusia.¹² Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui bagaimana hasil

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023* (Semarang: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 12

¹² Fiqri Febrian Pratama dan Siti Aisyah, "Pengaruh IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Bali Tahun 2018-2021", *Jurnal Ekonomikawan*, 23, no.1, (2023): 1-10, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10174>, hlm. 3

pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah dapat diakses oleh penduduk di wilayah tersebut, pengukuran tersebut mencakup tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.¹³ Berikut ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah pada tahun 2023 tergolong tinggi, namun terdapat ketimpangan nilai IPM antara kabupaten dan kota. Beberapa kabupaten di Jawa Tengah memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia tergolong rendah. Kota Salatiga menduduki kabupaten di Jawa Tengah dengan Indeks

¹³ Lisa Agustin, “Pengaruh Pengangguran, IPM, dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur,” *EKONIKA : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7, no. 2, (2022): 263-286, <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2221>, hlm. 264

Pembangunan Manusia tertinggi yaitu sebesar 84,99%. Sedangkan Kabupaten Brebes menduduki kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu sebesar 67,95%. Kabupaten Brebes menjadi daerah dengan UHH terendah 73,95 tahun dengan RLS 6,40 tahun, hal ini disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah dan minimnya akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan kualitas pembangunan daerah tersebut rendah, produktivitas rendah, dan tingginya tingkat kemiskinan.¹⁴ Dengan demikian, bisa dilihat bahwa kinerja program pembangunan di Jawa Tengah belum sepenuhnya berhasil. Perbedaan kualitas hidup masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua penduduk di Jawa Tengah mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dengan baik dan merata.

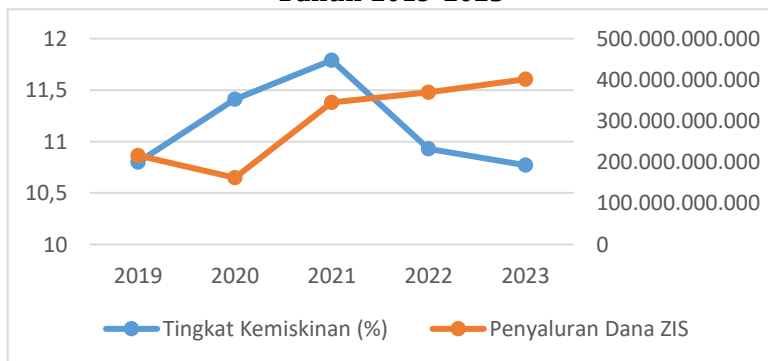
Faktor yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan salah satunya adalah penyaluran dana zakat infak, dan sedekah. Perolehan dana zakat infak, dan sedekah berfungsi sebagai sumber permodalan potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga agar harta tetap produktif dan terus berputar dalam perekonomian, sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Melalui pemanfaatan dana zakat infak, dan sedekah diharapkan dapat meningkatkan output, menciptakan lapangan kerja, dan meratakan distribusi pendapatan, sehingga mengurangi kemiskinan.¹⁵ Pendistribusian zakat infak, dan sedekah harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan agar kekayaan

¹⁴ BPS Jawa Tengah, *Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2023* (Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024), hlm. 45

¹⁵ Munandar Eris, dkk, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1, no. 1 (2020):25-38, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5321>, hlm. 26

tersebar merata dan tidak terpusat pada golongan tertentu. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) baik di tingkat nasional maupun daerah¹⁶ Dengan mayoritas penduduk Jawa Tengah yang beragama Islam, ada peluang besar untuk memanfaatkan zakat infak, dan sedekah dalam mendukung pengentasan masalah kemiskinan. Berikut ini merupakan penyaluran dana zakat infak, dan sedekah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Gambar 1. 4 Data Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 penyaluran dana zakat infak, dan sedekah terus mengalami peningkatan. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah cukup besar, namun realisasi penyaluran dana tersebut masih belum merata, dimana penyaluran terbesar terpusat pada daerah perkotaan. Meskipun rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menurun namun beberapa daerah kabupaten masih mengalami

¹⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021), hlm. 12

tingkat kemiskinan yang tinggi. Kabupaten Kebumen mendapatkan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp. 5.777.120.680 dengan total muzaki 93,930 ribu jiwa, penyaluran dana tersebut sebagian besar ditujukan untuk bantuan konsumtif, dimana jumlah penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah ini masih tergolong sedikit bila dibandingkan daerah perkotaan, sehingga kabupaten tersebut masih menduduki tingkat kemiskinan tertinggi.¹⁷ Semakin banyaknya penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di daerah tersebut maka penduduk miskin akan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi dana zakat infak, dan sedekah yang merata dapat memberdayakan mustahik di seluruh wilayah untuk memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat menghambat perekonomian, perlu beberapa kebijakan yang harus diperhatikan secara menyeluruh oleh pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan, karena masalah ini berdampak luas pada kondisi sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya kriminalitas, terganggunya stabilitas sosial serta menurunnya sumber daya manusia.¹⁸ Hingga saat ini permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum dapat ditangani dengan baik di Provinsi Jawa Tengah. Masalah kemiskinan telah banyak dikaji oleh para peneliti. Pada penelitian ini, peneliti ingin menambahkan variabel terkait ekonomi syariah yaitu penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang sebelumnya jarang dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Berdasarkan latar

¹⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*, (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 193

¹⁸ Mashudi, *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Dan Pemberdayaan Sosial Terhadap Pendapatan Dan Implikasinya Pada Kesejahteraan Warga Miskin* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), hlm. 7

belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023 masih tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan ini dapat memperlambat perekonomian, termasuk meningkatnya kriminalitas serta menurunnya sumber daya manusia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan ini perlu perhatian penuh dari pemerintah.
2. Perolehan Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah pada tahun 2023 tergolong tinggi, namun belum diimbangi pemerataan. Pembangunan ekonomi daerah masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu dan belum mencakup seluruh kawasan di Jawa Tengah.
3. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2023 memiliki nilai yang relatif tinggi, namun terdapat kesenjangan antara nilai IPM di kabupaten dan kota. Perbedaan dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak belum merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
4. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di Jawa Tengah tahun 2023 cukup besar, namun masih belum terjadi pemerataan dalam penyaluran dana antar kabupaten dan kota. Kinerja pendistribusian zakat, infak, dan sedekah perlu ditingkatkan agar mustahik di semua wilayah memiliki

peluang yang sama dalam memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023?
4. Apakah penyaluran dana zakat, infak, sedekah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara simultan pengaruh signifikan Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023.

3. Untuk menguji pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan penyaluran dana zakat, infak, sedekah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis sebagai sumber informasi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi ekonomi mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2023.

2. Secara Praktis

a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru di bidang ekonomi, dan menambah literatur bagi para akademisi serta perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah.

b. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sebagai sarana evaluasi

untuk merumuskan kebijakan selanjutnya mengatasi kemiskinan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, perbandingan, dan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya, guna menambah pengetahuan terutama bagi pihak yang tertarik dengan masalah yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di wilayah 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas, penulis membatasi masalah dengan hanya meneliti tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023.

G. Penegasan Istilah

Penjelasan istilah dalam sebuah penelitian digunakan untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang dijelaskan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah komponen penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan

diteliti. Berdasarkan teori yang telah ditelaah, definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.¹⁹
- b. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara yang mengkombinasi perhitungan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita.²⁰
- c. Penyaluran dana zakat, infak, sedekah adalah proses pendistribusian zakat, infak, dan sedekah kepada individu atau kelompok yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²¹
- d. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosial-ekonominya.²²

2. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan batasan yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana variabel akan diukur.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2019-2023*, (Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024), hlm. 6

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 7

²¹ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf)* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hlm. 142

²² Bambang Rusanto, dkk, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 34

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Penyaluran dana zakat, infak, sedekah (X3). Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kemiskinan (Y).

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pola penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 bagian:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab, seperti yang dijelaskan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan untuk variabel yang ada yakni tingkat kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia,

penyaluran dana zakat, infak, sedekah, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, teknik sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan. Berisi deskripsi data Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan tingkat kemiskinan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan beberapa saran dari peneliti untuk pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Oscar Lewis memaknai kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosial-ekonominya. Sumber- sumber daya material yang dimiliki atau dikuasanya betul-betul sangat terbatas, sekedar mampu digunakan untuk mempertahankan kehidupan fisiknya, tidak memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya.²³ Menurut Kartasasmita kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Kemiskinan menggambarkan kondisi rendahnya pendapatan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia.²⁴

Menurut *Human Development Index* dalam MDGs kriteria kemiskinan adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah USD 2 per hari masuk dalam kategori miskin (*poverty-poor*), sedang masyarakat yang berpenghasilan di bawah USD 1 per hari termasuk sangat miskin (*extreme poverty-poor*). Adapun menurut versi Indonesia, garis kemiskinan Nasional ditentukan oleh jumlah rupiah yang diperlukan oleh tiap individu untuk makanan setara 2.100 kilo kalori/hari. Menurut Gazalba, orang miskin adalah mereka yang memiliki harta dan usaha, tetapi tidak cukup untuk

²³ Bambang Rusanto, *Menangani Kemiskinan.....*, hlm. 7

²⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan.....*, hlm. 8

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan ditandai dengan penghasilan pas-pasan, konsumsi makanan minim gizi, tabungan sangat terbatas, lahan garapan kecil atau tidak ada, pendapatan rendah dengan tanggungan keluarga besar, pekerjaan tidak tetap, serta kondisi tempat tinggal yang sederhana atau bahkan tidak memiliki rumah.²⁵

Dimensi kemiskinan mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Pertama, aspek politik, yang mencerminkan ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, aspek sosial, di mana individu atau kelompok tersingkir dari institusi utama dalam masyarakat. Ketiga, aspek ekonomi, yang meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, yang berdampak pada rendahnya pendapatan serta keterbatasan akses terhadap aset lingkungan hidup seperti air bersih dan listrik. Keempat, aspek budaya, yang mencakup terperangkapnya individu dalam budaya yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti lemahnya etos kerja, pemikiran jangka pendek, dan kecenderungan untuk mudah menyerah.²⁶

2. Macam-Macam Kemiskinan

Adapun macam-macam kemiskinan, dibagi menurut penyebabnya dan konsep yaitu:²⁷

²⁵ Mashudi, *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi.....*, hlm. 3

²⁶ Licolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), hlm. 300

²⁷ Endang Mulyani, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hlm. 111

- a. Kemiskinan Menurut Penyebabnya
 - 1) Kemiskinan alamiah, terjadi karena keadaan alam yang miskin atau langka, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah.
 - 2) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena alokasi sumber daya yang tidak terbagi secara merata.
 - b. Kemiskinan Secara Konsep
 - 1) Kemiskinan subjektif, yaitu apabila setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup, sebenarnya tidak tergolong miskin.
 - 2) Kemiskinan absolut adalah seorang (keluarga) yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk memelihara kondisi fisiknya secara efisien.
 - 3) Kemiskinan relatif adalah posisi relatif seseorang terhadap anggota masyarakat lain dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan. Konsep ini berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan.
3. Indikator Kemiskinan
- Salah satu alat ukur untuk menilai tingkat kemiskinan adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas, yaitu:²⁸
- a. Keterbatasan pangan. Dapat dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
 - b. Keterbatasan akses kesehatan. Dapat dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu

²⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan.....*, hlm. 18

layanan kesehatan dasar, mahalny biaya pengobatan dan perawatan.

- c. Keterbatasan akses pendidikan. Diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalny biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
- d. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, perbedaan upah.
- e. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan, sanitasi, air bersih, tanah dan sumber daya alam.
- f. Tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi.
- g. Rendahnya keterlibatan pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

4. Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu:²⁹

- a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan perkapita secara global

Pendapatan per kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada. Jika produktivitas meningkat, maka pendapatan per kapita ikut naik. Sebaliknya, jika produktivitas menurun, maka pendapatan per kapita ikut turun. Faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan perkapita seperti, naiknya standar perkembangan suatu daerah politik ekonomi yang tidak sehat, menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Untuk menaikkan produktivitas masyarakat didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya

²⁹ Endang Mulyani, *Ekonomi Pembangunan.....*, hlm. 114-115

manusia yang berkualitas, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang optimal.

b. Biaya kehidupan yang tinggi.

Melonjak tingginya biaya kehidupan merupakan akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Maka kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

c. Pembagian subsidi income yang kurang merata

Hal tersebut akan menyulitkan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan bagi penduduk miskin. Selain itu, penduduk miskin masih terbebani oleh pajak negara

5. Perhitungan Tingkat Kemiskinan

Adapun beberapa ukuran atau indeks yang sering digunakan para ahli dalam penelitian empiris untuk mengukur kemiskinan, diantaranya adalah Foster Greer Thorbecke (1984):³⁰

- a. *Poverty headcount index* (P0) adalah ukuran kasar dari kemiskinan karena hanya menghitung jumlah orang miskin dalam perekonomian yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, ukuran ini hanya menjumlahkan banyak orang miskin dalam perekonomian yang kemudian dibuat persentasenya terhadap total penduduk.
- b. *Poverty gap index* (P1) adalah mengukur kedalaman kemiskinan didalam suatu wilayah. Indeks ini menghitung jarak atau perbedaan rata-rata pendapatan

³⁰ Henry J.D.Tamboto, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir* (Malang: CV. Seribu Bintang, 2019), hlm. 34–35

orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut.

- c. *Squared poverty gap* (P2) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa parah kemiskinan di suatu wilayah. Indeks P2 didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat kesenjangan kemiskinan (*squared poverty gap*). Ukuran P2 memperhitungkan keparahan kemiskinan (*severity of poverty*) di dalam suatu wilayah serta ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin di wilayah tersebut. Oleh karena itu, indeks ini juga sering disebut sebagai indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*).

Untuk menghitung tingkat kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan, BPS menggunakan formula yang telah dirumuskan oleh Foster Greer Thorbecke sebagai berikut:³¹

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

P0 = Tingkat persentase kemiskinan.

Z = Garis kemiskinan.

Yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $y_i < z$.

Q = Banyaknya penduduk yang di bawah garis kemiskinan.

N = Jumlah kemiskinan.

³¹ BPS, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 62

Sedangkan untuk menghitung garis kemiskinan, BPS menggunakan formula sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis kemiskinan.

GKM = Garis kemiskinan makanan.

GKNM = Garis kemiskinan non makanan.

6. Teori Lingkaran Kemiskinan

Lingkaran setan kemiskinan merupakan deretan yang melingkar karena beberapa faktor yang saling berinteraksi sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam garis kemiskinan. Teori kemiskinan didasarkan atas teori lingkaran setan kemiskinan dimana terjadi karena kondisi pasar yang jauh dari kata sempurna, modal terbatas, dan sumber daya manusia rendah. Menurut Nurkse pada teori lingkaran setan kemiskinan menyatakan bahwa, kemiskinan disebabkan karena adanya keterbelakangan perekonomian, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan melambatnya sektor ekonomi serta rendahnya produktivitas. Perlambatan sektor perekonomian berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di suatu wilayah dikarenakan jumlah dari keseluruhan sektor perekonomian dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto.³²

Rendahnya produktivitas manusia akan menurunkan pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi, kemudian menyebabkan keterbelakangan. Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan hal yang sama, dimana suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang dan tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk meningkatkan

³² M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan.....*, hlm. 33

pembangunan. Keterbelakangan yang dimaksud menyangkut keterbelakangan sumber daya manusia dan akumulasi modal yang menyebabkan semakin tinggi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara, salah satunya yaitu sumber daya manusia yang kurang terampil.³³ Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui penyebab kemiskinan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah sebagai sumber akumulasi modal.

B. Produk Domestik Regional Bruto

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.³⁴ Produk Domestik Regional Bruto merupakan ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh setiap daerah bergantung pada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut atas dasar harga berlaku karena menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang

³³ *Ibid.*, hlm. 34-35

³⁴ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi.....*, hlm. 6

berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun dasar tertentu. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, apabila nilai Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar dan begitu juga sebaliknya. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.³⁵

2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Adapun beberapa kegunaan Produk Domestik Regional Bruto yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

- a. Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.
- b. Produk Domestik Regional Bruto harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah.

³⁵ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia* (Jakarta: AKA Building Ground Floor, 2018), hlm. 33

³⁶ *Ibid.*, hlm. 6-7

- d. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- e. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah

3. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:³⁷

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas dasar harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) ditambah pajak atas produk neto (pajak kurang subsidi atas produk). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik dan gas, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estat, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15)

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2019-2023* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024), hlm.4-6